

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan salah satu unit penting yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu, program pengembangan sekolah harus diorientasikan agar para peserta didik mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Selain tuntutan global dan nasional, sekolah juga dihadapkan pada berbagai macam tuntutan local, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pengembangan sekolah yang efektif menjadi sangat signifikan. Sehubungan dengan itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah mampu menjalin hubungan yang baik dan bersifat resiprokal dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Lebih dari itu, bagaimana kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam mengembangkan program-programnya, serta dalam mewujudkan visi dan misinya. Untuk kepentingan tersebut perlu dibentuk komite sekolah.¹

Berdasarkan Undang-undang RI NO. 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional pasal 56 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah adalah:

“(1) masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, (2) dewan pendidikan sebagai mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis, (3) komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, (4) ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

¹ Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*(Jakarta: bumi aksara, 2012), 127

ayat(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.² Oleh karena itu, peran serta masyarakat diharapkan bersinergi dengan wadah ini. Dengan kata lain, peran masyarakat dan orang tua siswa di sekolah diharapkan lebih difokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan.”

Pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.³ Sumber daya manusia meliputi kepala sekolah, guru dan karyawan-karyawan sekolah, namun disamping itu tidak lupa adanya komite sekolah yang membantu jalannya pelaksanaan pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui usaha berbagai macam pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan manajemen sekolah.

Perubahan yang diinginkan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau mutu sekolah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra’du:11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya : “sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga (mereka) mau merubah diri mereka sendiri”(Q.S. Ar-ra’du : 11).⁴

² Undang-Undang sisdiknas (sistem pendidikan nasional) UU RI No. 20 Th. 36-37

³ Rohiat .*manajemen sekolah* (bandung: PT refika Aditama, 2008) , 52

⁴ Depag RI, *Al Qur’an Terjemah*, (Bandung : Regency III, 2002), 11.

Berdasarkan ayat diatas yang memiliki pengertian bahwasanya perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bila dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan atau mutu sekolah ayat itu relevan.

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan. Merupakan suatu yang mustahil, pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, jika tidak melalui proses pendidikan yang bermutu pula. Suatu yang mustahil pula terjadi proses pendidikan yang bermutu jika tidak didukung oleh factor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu pula.

Mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.⁵

Dalam pasal 1 ayat (2) keputusan menteri tersebut dinyatakan, pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk komite sekolah, atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Komite sekolah sendiri dalam keputusan menteri didefinisikan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁶

⁵ Mujamil, Qomar, *Manajemen pendidikan islam*, (Malang: Erlangga. 2007) , 206.

⁶ Kadi, *Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*, 39.

Secara filosofis Sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat, masyarakat pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat, saling ketergantungan antara sekolah dengan masyarakat, sekolah merupakan lembaga sosial yang melayani pendidikan masyarakat. Kerjasama sekolah dengan masyarakat akan mendorong kemajuan sekolah sesuai harapan masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam semua aspek manajemen sekolah mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program termasuk keuangan.

Komite sekolah dapat diartikan sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.⁷

Ditinjau dari perspektif historis penyelenggaraan persekolahan di Indonesia, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam pendidikan sudah berjalan sejak lama, sebelum tahun 1974 orang tua siswa telah membentuk wadah yang disebut POMG (Persatuan Orang Tua Murid Dan Guru). Mulai tahun 1974 POMG dibubarkan dan diganti dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan). BP3 didasarkan instruksi menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri dalam negeri No.17/0/1974, dan No.29/0/1974. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan pemberlakuan otonomi daerah serta amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, BP3 di ganti dengan komite sekolah.

⁷ Undang-Undang sisdiknas (sistem pendidikan nasional) UU RI No. 20 Th. 2003, 6

Berdasarkan keputusan menteri nasional tersebut komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang mewadahi peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan diluar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan. Seperti komite madrasah, majlis sekolah atau nama-nama lain yang telah disepakati bersama.⁸

Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih kongkrit antara sekolah dan masyarakat antara lain:

1. Guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didiknya
2. Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini
3. Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih maju dan lebih membumi agar lebih dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.⁹

Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat dan kalangan swasta di satu pihak ke pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayah, dan pemerintah daerah dipihak lainnya. Dan komite sekolah dapat menjembatani kepentingan keduanya.

⁸ Hasbullah, *Otonomi pendidikan*,(Jakarta: grafindo persada) , 89-90.

⁹ Tim dosen administrasi pendidikan universitas pendidikan Indonesia, manajemen pendidikan, bandung:alfabeta 2013, 280

Tetapi demikian keberlangsungan komite sekolah sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan sekolah kadang terabaikan keberadaannya misalnya terlihat di beberapa sekolah yang kebijakan kurikulum, fasilitas dan sarana prasaranya kurang begitu mendukung sehingga pembelajaran bisa terganggu dan kurang sesuai dengan maksud dari tujuan sekolah itu sendiri.

Berbeda dengan sebagian sekolah yang sudah mengetahui dengan tujuan dan manfaat keberadaan komite sekolah kaitannya dalam peningkatan mutu pendidikan. Salah satu sekolah tersebut adalah Sekolah menengah pertama negeri 3 kalisat.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti mengadakan penelitian di SMPN 3 kalisat antara lain: *pertama* SMPN 3 kalisat adalah salah satu sekolah menengah pertama yang dalam dekade terakhir telah berhasil dalam peningkatan mutu pendidikannya. Terlihat dari keberadaan siswa yang lulus UN 100%. *Kedua* kinerja komite sekolah di SMPN 3 kalisat masih berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari realita yang ada di lembaga yang bersangkutan, seperti adanya fasilitas-fasilitas pendidikan yang lengkap dan program-program yang ada di lembaga itu dapat berjalan dengan baik. Hal ini kemudian memungkinkan untuk mendongkrak minimnya minat masyarakat terhadap pendidikan di SMPN 3 kalisat.

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat tahun ajaran 2016/2017?
- b. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat tahun ajaran 2016/2017?

- c. Bagaimana peran komite sekolah sebagai pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat tahun ajaran 2016/2017?
- d. Bagaimana peran komite sekolah sebagai penengah antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat tahun ajaran 2016/2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melaksanakan penelitian harus mengaju kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat
- b. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat.
- c. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat.
- d. Mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai penengah antara pemerintah dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 3 Kalisat

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran bagi peneliti pribadi maupun seluruh pihak yang bersangkutan.

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas tentang peran komite sekolah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan tentang bagaimana peran komite sekolah.
- c. Rangka memperkaya khasanah keilmuan dan pengetahuan yang terkait dengan peran komite sekolah di lembaga perguruan tinggi khususnya IAIN Jember.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Peneliti Sebagai media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan peneliti tentang peran komite sekolah.
- b. Pihak sekolah, dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran dan menjalankan tugas komite sekolah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat menjadikan mutu pendidikan dimadrasah menjadi lebih baik.
- c. IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Kependidikan Islam prodi manajemen pendidikan islam yang ingin mengembangkan kajian tentang peran komite sekolah atau dengan hubungan masyarakat dengan sekolah.
- d. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan melalui komite sekolah.

E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar serta menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami masalah yang akan diteliti, maka dipandang perlu untuk menegaskan judul dalam penelitian.

1. Komite Sekolah/Madrasah

Dalam pasal 1 ayat (2) keputusan menteri tersebut dinyatakan, pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk komite sekolah, atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Komite sekolah sendiri dalam keputusan menteri didefinisikan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.¹⁰

2. Mutu Pendidikan

Membicarakan tentang pengertian kualitas atau mutu dapat berbeda makna bagi setiap orang, karena mutu memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Dalam mendefinisikan mutu ada beberapa pakar utama dalam TQM (*Total Quality Manajemen*) yang saling berbeda pendapat, tetapi sebenarnya memiliki maksud yang sama.¹¹

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Bagi setiap industri, mutu adalah agenda utama dan peningkatan mutu merupakan tugas yang apling penting. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu

¹⁰ Kadi, *Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah* (jakarta: STAIN PRO PRESS 2009), 39.

¹¹ Edward sallis, *manajemen mutu terpadu pendidikan* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 43.

hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik.¹²

Mutu adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tidak langsung, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan.¹³

Berdasarkan definisi istilah tersebut maka yang dimaksud dengan “*peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 kalisat tahun ajaran 2016/2017*” adalah peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sudah berjalan sejak lama. Keikutsertaan itu tidak terlepas dari kesadaran bersama akan pentingnya mutu pendidikan. Komite sekolah merupakan Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam peningkan mutu pendidikan. Dengan peran sebagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, sebagai pengawas dan sebagai penengah di SMP Negeri 3 kalisat berjalan dengan sangat baik.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

1. Bagian awal skripsi

¹² Edward, Sallis, *Total quality manajement in education* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015) , 23.

¹³ Tampubolon, *perguruan tinggi bermutu* (Jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2001) , 108.

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian inti skripsi

- a. Bab satu, membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab dua, merupakan bahan rujukan (kajian kepustakaan) yang menjelaskan tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 kalisat tahun ajaran 2016/2017
- c. Bab tiga, membahas tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data tahap-tahap penelitian.
- d. Bab empat, membahas tentang penyajian data dan analisis yang meliputi: gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.
- e. Bab lima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.

3. Bagian akhir skripsi

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam skripsi.